

RETORIKA

Jurnal Ilmu Komunikasi

Sosok Ebith Best-A dalam Pendekatan Dramatugi
Rasman Sonjaya dan Dinar Permadi Rachman

**Peran Media dan Komunikasi Politik dalam Proses
Kepemimpinan pada Pemilu 2009**
Sutrisno

**Analisis Wacana Naskah Berita Program "Bewara Malam"
pada Stasiun Televisi PJTV Bandung**
Hj. Yulia Segarwati dan Ratna Oktaviana Juwita

Memahami Filsafat Komunikasi
Heri Erlangga

**Peranan Komunikasi dengan Masyarakat (Publik) dalam
Pembentukan Peraturan Daerah yang Tepat Guna**
Latifah Adnani

Membangun Kekuasaan Lewat Komunikasi
M. Nazaruddin

Peran Pers Kampus dalam Meningkatkan Kualitas Pemilu 2009
Anang Usman dan Ade Priangani

Komunikasi dan Partisipasi Politik dalam Pemilu Presiden 2009
Achdiat

Komunikasi sebagai proses Sosial dan Proses Budaya
Trisa Nur Kania

KOMUNIKASI DAN PARTISIPASI POLITIK DALAM PEMILU PRESIDEN 2009

Achdiat

Abstract

Political communication and political participation are interlinked in direct election, both Legislative Election and President and Vice President Election. Ideal political communication and effective political participation may enable all actors within the political system to interact one another directly, openly, and dynamically towards new more democratic Indonesian.

Keywords : Political Communication, President and Vice President Election.

A. Pendahuluan

Jelang Pemilu Tahun 2009, sebagai arena pesta demokrasi untuk menentukan orang nomor satu di Indonesia sudah mulai menunjukkan geliatnya. Gaungnya, jelas kian terasa, ketika proses komunikasi politik mulai dibangun oleh berbagai partai politik, dalam mencari model dan koalisi bersama, untuk dapat menciptakan format politik yang dianggap paling ideal, guna menembus kancah pertarungan politik nanti, yang boleh jadi sangat seru dan cukup garang.

Manuver awal, dalam rangka reposisi konstelasi politik di Indonesia, mulai digagas oleh dua partai besar yang cukup dominan di negeri ini, melalui pertemuan antara Partai Golkar dan PDIP beberapa waktu yang lalu. Kendatipun, dari ajang pertemuan kedua partai itu, secara analitis belum menunjukkan hasil yang signifikan, tetapi dampaknya cukup untuk memberikan sentuhan dan nuansa baru dalam perubahan peta politik Indonesia ke depan.

Munculnya, berbagai skenario yang diusung beberapa partai politik, boleh jadi, merupakan respon lanjutan terhadap peristiwa politik di atas. Sebut saja, gerakan angin segar yang dikomandokan oleh Sys NS. dengan memunculkan isue figur calon presiden dari kalangan elite politik dan

intelektual muda yang secara riil banyak menuai simpati publik, hal ini tentu saja merupakan fragmentasi politik berikutnya yang menarik dan layak untuk dicermati.

Fenomena lain, turut memberikan nuansa dalam proses politik untuk meraih kursi pada pemilu 2009, adalah dengan digelarnya pertemuan besar di Hotel *Four Seasons*, Jakarta, awal Oktober 2007, "*Sutiyoso For Presiden!*". Tokoh yang satu ini, meskipun belum dikenal jelas dalam skala nasional, namun disinyalir memiliki jaringan luas.

Tak pelak lagi, deklarasi Sutiyoso, pensiunan opsir tinggi, "Sang Gubernur DKI Jakarta dua periode", disaksikan oleh tokoh-tokoh besar di negeri ini, seperti mantan Presiden Abdurrachman Wahid, mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, mantan Kepala BIN A.M. Hendropriyono, mantan Menteri Otonomi Daerah Ryaas Rasyid, dan mantan Anggota DPR Sophan Sophiaan (Alm.). Serta tidak luput dihadiri pula oleh beberapa kalangan selibritis muda papan atas.

Motivasinya, untuk mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia, sangat tinggi. Demi meloloskan niatnya, Sutiyoso giat menawarkan diri ke partai-

partai politik besar, untuk memenuhi aturan main undang-undang pemilihan presiden, di mana setiap calon harus mendapat dukungan partai politik atau gabungan partai dengan suara 15 persen pada pemilu legislatif.

Demi meloloskan niatnya, Sutiyoso, tak pernah segan untuk melakukan pendekatan terhadap partai-partai yang berhaluan Nasional dan Islam, dengan asumsi, dukungan kombinasi partai tersebut, diyakini mampu mewujudkan keinginannya. Pemimpin PAN, Sutrisno Bachir. Ketua Umum PDIP Megawati Sukarno Putri, telah dijambanginya. Kendatipun kedua tokoh elite politik inipun terindikasi memiliki keinginan yang sama kuat untuk kembali mencalonkan diri sebagai Presiden.

Bahkan, untuk mendongkrak popularitasnya di tingkat nasional, tak cuma wara-wiri mendatangi para elite politik di Jakarta. Tokoh spritual dan juru kunci Gunung Merapi Mbah Maridjan, tak dilewatkannya pula untuk dijambangi bersama Chris John, sang juara tinju dunia. Sungguh pertimbangan yang amat logis, karena kedua jawara ini terkenal diseantero nusantara cukup representatif dijadikan sarana propaganda politik. Pendek kata, bahwa Sutiyoso siap bertarung dengan siapapun di aras nasional, termasuk dengan mantan bawahannya dulu, Susilo Bambang Yudoyono Presiden Republik Indonesia.

Lalu bagaimana, tanggapan dari *incumbent*, SBY sebagai Presiden Republik Indonesia, atas gerakan-gerakan politik saat ini. Melalui juru bicara kepresidenan Andi Malarangeng, saat itu menyatakan secara diplomatis, bahwa Presiden SBY tidak terpengaruh oleh manuver politik siapapun sekarang ini, karena SBY masih memiliki masa bakti selama dua tahun ke depan, oleh karena itu, beliau akan berkonsentrasi pada tugas-tugas yang harus dilaksanakannya sampai habis masa jabatannya sebagai Presiden.

Gebyar di Tahun 2008, maraknya iklan politik terutama yang dilansir di media televisi yang mengedepankan figur-figur muda dibursa calon presiden 2009-2014, sebut saja Letnan Jenderal Purnawirawan Prabowo Subiyakto dengan Partai Gerindra yang berbasis masa HKTI, juga Rizal Malarangeng dengan kekuatan intelektualnya, turut menyemarakkan menuju gerbang pemilu presiden di negeri ini. Tentu, munculnya kedua tokoh tersebut diantara tokoh-tokoh lainnya, jadi sorotan yang secara proporsional perlu diperhitungkan.

Kenapa tidak ? Isu Calon Presiden dari kalangan muda yang terus dihembuskan, telah menuai reaksi kritis dan juga santun dari salah satu tokoh politik kahot seperti Amien Rais, untuk tidak terus-menerus mendikotomikan calon Presiden dari kalangan muda maupun tua secara diametral. Calon Presiden baik dari kalangan muda maupun kalangan tua, semuanya memiliki hak, tanggungjawab dan kesempatan yang sama untuk maju menjadi calon Presiden di Tahun 2009, yang muda dan yang tua sebaiknya secara bersama-sama saling bergandengan tangan bahu membahu, untuk segera membangun negeri ini dari keterpurukannya. Wacana ini, tentu saja merupakan suatu usulan yang dapat dipandang sungguh sangat bijaksana.

Wacana politik, dengan berbagai pola yang dibangun memang sah-sah saja, namun demikian, apapun dan bagaimanapun skenario politik yang dirancang, juga seperti apapun gerakan politik yang akan dipilih, tentu saja, ada hal yang juga tidak kalah pentingnya untuk tidak diabaikan dalam proses politik ke depan. Hal penting itu, berkaitan dengan bagaimana membangun komunikasi politik yang efektif.

B. Telaah Dalam Bidang Komunikasi Politik

Kegiatan dalam proses politik sebagaimana telah diuraikan di atas, barangkali dapat diasumsikan sebagai bentuk pilihan dari permulaan dalam merancang bangun model komunikasi politik yang dilakukan oleh beberapa elite politik baik berdasarkan lintas kekuatan partai politik maupun lintas kepentingan, ataupun dalam bentuk kontak langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, deskripsi di atas kertas, siapapun orangnya (kandidat) yang mampu membangun komunikasi politik secara efektif maka dialah yang akan mulus dan mampu melaju sebagai pemenangnya untuk menduduki kursi Presiden.

Konsep komunikasi politik telah banyak dikonstruksi oleh para Begawan ilmu politik, walaupun para Linuhung ilmu politik ini memandang bahwa istilah komunikasi politik masih relatif baru, dengan pertimbangan konsep ini mulai dipelajari sejak munculnya tulisan *Gabriel A. Almond* dalam buku "*The Politics of the Development Areas*", pada tahun 1960. Oleh karena itu, para ilmuwan politik beranggapan bahwa komunikasi politik termasuk dalam bidang kajian ilmu politik.

Boleh jadi demikian, sebab pesan-pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan baik secara langsung maupun melalui media/sarana tertentu, dalam konteks proses komunikasi tersebut mengandung ciri-ciri politik, yakni berkaitan dengan institusi kekuasaan politik, negara, dan pemerintahan. Di mana kedua belah pihak atau beberapa pihak yang terlibat dalam proses komunikasi politik tersebut, ialah orang-orang sebagai pelaku yang terlibat dalam aktivitas politik.

Maswadi Rauf (1993), dalam tulisannya tentang "Indonesia dan Komunikasi Politik" memberikan pengertian komunikasi politik, sebagai proses

komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik dalam setiap kegiatan kemasyarakatan, melalui saluran media massa dan saluran tatap muka, di mana kedua saluran tersebut memainkan peranan yang sama pentingnya.

Gabriel A. Almond dalam Mas'ood dan Andrews (1978), menyatakan bahwa komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik sehingga terbuka kemungkinan bagi para ilmuwan politik untuk memperbandingkan berbagai sistem politik dengan latar belakang budaya yang berbeda. Jadi dengan demikian, jelaslah bahwa komunikasi politik dan sistem politik, merupakan dua terminologi yang saling berhubungan

Pengertian sistem politik, dikemukakan oleh *David Easton* dalam Mas'ood dan Andrews (1978), sebagai seperangkat interaksi yang diabstraksikan dari totalitas kelakuan sosial, di mana nilai-nilai otoritatif dialokasikan kepada masyarakat. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa sistem politik terdiri dari infra struktur politik dan supra struktur politik, yang saling berhubungan dan berinteraksi melalui mekanisme berdasarkan fungsi yang melekat pada setiap struktur politik. Interaksi di antara struktur-struktur politik dalam suatu sistem politik tersebut, dapat dilihat sebagai unsur-unsur dari sistem komunikasi politik, meskipun tidak selamanya dan tidak semua unsur suatu sistem komunikasi politik merupakan bagian struktural dari sistem politik.

Fungsi komunikasi politik dalam sistem politik, akan terlihat jelas dalam proses politik, *Colin MacAndrews* (1978), menguraikan proses politik dimulai dengan masuknya input berupa aspirasi / kepentingan yang diartikulasikan oleh kelompok kepentingan, kemudian diagregasikan oleh partai politik untuk disampaikan kepada penguasa politik.

pemerintah, selanjutnya menjadi suatu usulan dalam proses pembuatan kebijakan publik.

Jadi dengan demikian, fungsi komunikasi politiknya terletak pada kata "penyampaian" aspirasi, tuntutan / kepentingan masyarakat kepada elite politik, dan atau kepada pemerintah, dan sebaliknya respon elite politik atau pemerintah kepada masyarakat atas tuntutan tersebut. Oleh karena itu, paling tidak ada dua indikator yang menunjukkan bahwa kajian komunikasi politik membahas tentang artikulasi / agregasi kepentingan dan partisipasi politik.

Senada dengan hal itu, *Michael Rush* dan *Phillip Althoff* (1993), menyatakan bahwa komunikasi politik itu memainkan peranan yang penting sekali di dalam sistem politik; komunikasi politik ini menentukan elemen dinamis, dan menjadi bagian menentukan dari sosialisasi politik, perekrutan politik, dan partisipasi politik. Sedangkan *Dan Nimmo* (2004), menyebutkan tentang cakupan komunikasi politik meliputi ; komunikator politik (politisi, profesional, dan aktivis), pesan politik, persuasi politik, media komunikasi politik, dan akibat-akibat dari komunikasi politik.

Dengan demikian, jelaslah bahwa apa yang ditawarkan belakangan ini oleh para kandidat Presiden, melalui berbagai sarana dan perangkat politiknya semata-mata untuk membangun komunikasi politik, dengan harapan munculnya dukungan sesuai pesan-pesan dan program yang ditawarkan. Sebaliknya, masyarakatpun akan memberi dukungan kepada siapapun calon-calon Presiden nanti, dengan pertimbangan calon yang dipilihnya nanti mampu mengakomodir aspirasi / kepentingannya, untuk dapat diagregasikan / diartikulasikan ke dalam kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan tuntutan dan harapannya.

Optimalisasi komunikasi politik bagi para kandidat Presiden, merupakan faktor determinan dalam rangka sosialisasi, rekrutmen, dan partisipasi politik, tentu saja dengan melibatkan peran para komunikator politik, untuk mampu merubah sikap dan perilaku orang melalui penanaman opini baru (persuasi politik), dalam menarik simpati dan keberpihakan terhadap kandidat tertentu, melalui partisipasi politik nyata dalam Pemilihan Umum Presiden Tahun 2009.

C. Konsepsi Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan fenomena baru yang berkembang sejalan dengan perkembangan sistem demokrasi di berbagai belahan dunia, oleh karena itu kaitan antara partisipasi politik dengan demokrasi sangat erat. Sistem demokrasi tidak akan berjalan apabila tidak ada partisipasi politik yang dilakukan oleh rakyat, karena merupakan prasyarat bagi pertumbuhan demokrasi yang ideal.

Oleh karena itu, sebuah negara yang menganut sistem demokrasi, sudah seyogyanya dapat mendorong prakarsa masyarakat untuk berperan aktif dalam kehidupan politik, sehingga kehidupan politik tidak hanya didominasi dan dijalankan oleh segelintir orang yang disebut kaum *establishment* (mapan), tetapi hendaknya rakyat pun turut mewarnai dan menentukan dalam kehidupan politik.

Seperti halnya, *Maswadi Rauf* (1993) mengatakan bahwa partisipasi politik adalah di mana rakyat turut serta menentukan penyelenggaraan kehidupan politik, karena menyuarakan keinginan dan tuntutan mereka, dengan demikian partisipasi menghasilkan input yang diperlukan oleh penguasa politik dalam proses pengambilan keputusan. Sedangkan, *Rusadi Kantaprawira* memaknai partisipasi politik sebagai bagian dari budaya politik, yang disebut budaya politik partisipan di mana seseorang

menganggap dirinya ataupun orang lain sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik.

Sebenarnya, dengan adanya partisipasi politik masyarakat, pemerintah mendapat keuntungan berupa petunjuk mengenai aspirasi yang berkembang di masyarakat, sehingga diharapkan keputusan politik yang dihasilkan oleh para penentu kebijakan, mampu memenuhi sebagian besar kepentingan publik. Namun demikian, pada kenyataannya partisipasi politik masyarakat seringkali mendapat sandungan, di mana hak untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan politik, hak untuk mengeluarkan pendapat dan aspirasi, atau hak untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan dibatasi oleh sekelompok minoritas yang berkuasa beserta kroninya.

Terlepas dari dibatasinya, atau pun terbukanya peluang masyarakat berperan aktif dalam kehidupan politik, jelas gerakan ke arah itu selalu ada selama masyarakat menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, juga adanya faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi perubahan kondisi di masyarakat.

Adapun, mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya partisipasi politik, dikemukakan *Myron Weiner* dalam *Mas'oeed dan Andrews (1978)*, diantaranya :

1. Modernisasi; ditandai dengan adanya perubahan taraf hidup masyarakat, peningkatan pendidikan masyarakat dan perkembangan media komunikasi massa.
2. Perubahan struktur kelas sosial; lahirnya kelas menengah sebagai kekuatan pengimbang terhadap hegemoni kekuasaan kelompok elit.
3. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern; munculnya ide-ide tentang egaliterianisme, nasionalisme, demokratisasi dan

partisipasi, yang tersebar luas kepada masyarakat melalui berbagai media massa modern.

4. Konflik diantara kelompok pemimpin politik; membuka peluang tawar-menawar diantara kelompok politik yang mencari dukungan massa dengan massa pendukung yang menuntut dipenuhinya kepentingan mereka.
5. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi dan kebudayaan; merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisir akan kesempatan untuk turut serta dalam pembuatan keputusan politik.

Selanjutnya, bagaimana partisipasi politik masyarakat dimanifestasikan dalam kehidupan politik, terdapat beberapa bentuk partisipasi politik seperti yang diuraikan oleh *Mochtar Mas'oeed dan Colin MacAndrews*, sebagai berikut :

1. Pemberian suara (*voting*), merupakan bentuk partisipasi politik aktif yang paling luas tersebar.
2. Bentuk-bentuk partisipasi konvensional, bentuk partisipasi ini melibatkan biaya lebih besar, dalam artian waktu, tenaga dan uang.
3. Demonstrasi, protes dan tindakan kekerasan, bentuk partisipasi seperti ini dilakukan apabila aktivitas lainnya dianggap tidak berjalan secara efektif. Tindakan kekerasan politik menurut *Gurr*, bersifat "*episodic*" dalam sejarah sebagian besar masyarakat politik dan kronis dalam beberapa masyarakat politik lainnya.

D. Realitas Komunikasi dan Partisipasi Politik

Setiap negara memiliki sistem politik yang berbeda, oleh karena itu, tampilan komunikasi politiknya pun berbeda pula, dengan demikian setiap negara

mengembangkan jaringan komunikasi politiknya sesuai dengan pola-pola sistem politik yang dianutnya. Syamsu Suryadi (Rauf dan Nasrun : 1993), mencoba mengelompokan sistem politik ke dalam dua sifat yaitu sistem politik demokratis dan sistem politik tidak demokratis / totaliter, maka akan terlihat penampilan dua pola komunikasi politik yang berbeda.

Pertama, pada sistem politik demokratis akan terlihat pola komunikasi politik tatap muka yang menurut *Dan Nimmo* (2004) disebut pola komunikasi dari satu kepada satu. Dampaknya, akan membentuk partisipasi politik aktif, terciptanya iklim politik yang bebas dan demokratis, serta keterbukaan informasi melalui media.

Kedua, pada sistem politik totaliter menampilkan pola komunikasi politik satu kepada semua, melalui media massa terutama surat kabar sebagai sarana propaganda politik, sedangkan komunikasi dengan pola tatap muka jarang atau bahkan tidak ditemui. Hal ini disebabkan oleh ketatnya sistem politik, rendahnya derajat kebebasan dan keterbukaan dalam kehidupan politik, pengendalian secara ketat terhadap media massa, kelompok kepentingan dan partai politik. Dengan demikian, iklim politik seperti ini cenderung tidak dapat memberi jaminan rasa aman bagi masyarakat dalam kehidupan politik.

Nampaknya, masih sulit untuk menggambarkan pola komunikasi politik di Indonesia, apakah berada pada pola pertama atau kedua, dengan pertimbangan sistem politik di Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila. Rudini (Rauf dan Nasrun : 1993) mengatakan bahwa Pancasila merupakan idiologi terbuka, oleh karena itu terbukalah ruang yang luas untuk mengembangkan berbagai pemikiran baru tentang komunikasi politik dalam sistem politik Demokrasi Pancasila, dengan menekankan pada dua nilai dasar Pancasila,

nilai dasar persatuan dan nilai dasar musyawarah dan mufakat atau demokrasi / kedaulatan rakyat.

Mengacu pada pertimbangan yang dikemukakan oleh Syamsu Suryadi, apabila Indonesia dikatakan menganut pola yang pertama tentunya banyak pengamat politik yang tidak setuju, sebab realitas kehidupan politik di negeri ini, iklim keterbukaan dan kebebasan berpolitik belum berkembang dan dikembangkan bagi setiap warga masyarakat. Apalagi, kondisi masyarakat kita termasuk elit politiknya masih sangat peka terhadap kritik, cenderung tidak terbuka, bersifat hipokrit, masih cukup feodal, serta segan dan tidak mau bertanggungjawab atas sikap, perbuatan, kelakuan, pernyataan pikiran dan keputusan yang diambilnya.

Sebaliknya juga, bila dikatakan berada pada pola yang kedua tetap saja banyak pihak yang tidak setuju, terlebih lagi kelompok elit penguasa, karena secara formal Indonesia menganut sistem yang demokratis dengan racikan Pancasila. Memang demikianlah adanya, di Indonesia sangat sulit untuk menentukan sesuatu, karena segalanya serba gamang dan semu.

Mungkin, sebagai jalan tengahnya, sebagian besar pakar politik akan setuju untuk memilih keseimbangan diantara keduanya. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa sistem demokrasi Pancasila, adalah demokrasi yang tidak liberal akan tetapi juga tidak otoriter. Jadi dengan demikian, di dalam model komunikasi politiknya mengambil hal-hal yang baik diantara kedua model komunikasi politik di atas.

Namun, apapun pilihannya, yang jelas partisipasi politik masyarakat Indonesia belum berada pada tarap yang memadai—andaipun tidak mau dikatakan hidup segan mati tak mau—, oleh karena saluran-saluran komunikasi politik yang ada belum terbuka lebar dan berfungsi sebagaimana mestinya.

Jadi sepertinya, wajar-wajar saja bila iklim kehidupan politik di Indonesia belum mengalami perubahan yang signifikan, karena secara struktural maupun kultural dalam konteks sistem politik masih jalan ditempat.

Pemikiran di atas, sebenarnya dapat memberikan gambaran dan menjadikan rujukan bagi para figur yang akan mencalonkan dirinya di ajang Pemilu Presiden, untuk membangun dan mengembangkan model komunikasi politik yang ideal, lebih terbuka, dan variatif, yang mampu mendorong dan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara aktif.

Apalagi, di Indonesia sudah berjalan model pemilihan secara langsung bagi Presiden dan Wakil Presiden, oleh karena itu, pilihan komunikasi politik lewat media cetak dan elektronik hanyalah merupakan salah satu elemen penting, disamping elemen penting lainnya seperti tatap muka dengan menjembangi langsung basis konstituen, sehingga pesan-pesan politik yang disampaikan pada kantung-kantung masyarakat tersebut akan mendapat respon yang dapat lebih terukur. Iklim dialogis, sosiologis dan psikologis antara kedua belah pihak dapat terbangun dengan kuat, dan secara tidak langsung partisipasi politik aktifpun akan terbangun dengan sendirinya.

Kesimpulan

Kemampuan membangun model komunikasi politik yang ideal, dan kemampuan untuk mendorong serta meningkatkan partisipasi politik aktif, merupakan kunci sukses untuk menggarungi kompetisi menuju kursi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009. Namun demikian, tidak kalah pentingnya dalam membangun komunikasi politik yang ideal dan partisipasi politik aktif dalam konteks jangka panjang, diarahkan untuk lebih dapat menumbuhkembangkan sendi-sendi kehidupan yang demokratis.

Tentunya, semua sangat tergantung pada *political will* dari elit politik, baik yang mengaku reformis maupun anti reformasi untuk dapat merealisasikannya, terutama bagi figur-figur yang akan ikut dalam kompetisi calon Presiden di Tahun 2009, maka sudah waktunya untuk membangun komunikasi politik yang sehat dan kondusif dalam rangka meraih dukungan melalui partisipasi politik masyarakat secara aktif, dinamis, dan demokratis.

Daftar Pustaka

- Amsari, Moh. Ernan.** 2001. *Isu-Isu Politik / Pemerintahan Kontemporer.* Bandung : Rumah Rayap.
- Duverger, Maurice.** 1993. *Sosiologi Politik.* Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Heru, CN.** *Pemilihan Umum 2009.* Majalah Tempo. 2007.
- Huntington, Samuel P.** 1995. *Gelombang Demokrasi Ketiga.* Jakarta : Pustaka Utama Grafiti.
- Kantaprawira, Rusadi.** 1985. *Sistem Politik Indonesia; Suatu Model Pengantar.* Bandung : Sinar Baru.
- Kantaprawira, Rusadi.** 1987. *Aplikasi Pendekatan Sistem dalam Ilmu-Ilmu Sosial.* Jakarta : Bunda Karya.
- Mas'oeed, Mochtar dan MacAndrews, Colin.** 1978. *Perbandingan Sistem Politik.* Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Rauf, Maswadi dan Nasrun, Mappa.** 1993. *Indonesia dan Komunikasi Politik.* Jakarta : Aipi dan Gramedia Pustaka Utama.
- Rush, Michael dan Althoff, Phillip.** 1993. *Pengantar Sosiologi Politik.* Jakarta : Raja Grafindo Persada.